

ANALISIS LOCATION QUOTIEN (LQ) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI KABUPATEN SLEMAN

*Djoko Susanto *) dan Rudy Badrudin **)*

ABSTRACTION

The economic development process of Indonesia, in fact, has caused many distortions so that endanger the integration of nation. These distortions happened because of too centered-development strategy causing distortion between central and region, and between region and region as well. The greater autonomy of region is one key policy for improving the distortions.

The autonomy of region be regulated in UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) and UU Nomor 25 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). These regulations can be implicated to all of regions, for example Kabupaten Sleman if all of regions and Kabupaten Sleman have revenue to budget development. One of revenue to budget development region is Pendapatan Asli Daerah (PAD) from profit's Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). For developing BUMD, each region has to make a fit development strategy based on its endowment. This paper discusses the strategy of regional development in case of Kabupaten Sleman. Using the Location Quotient (LQ) each region in Kabupaten Sleman, this paper recommends to develop one or many sectors in each kecamatan Kabupaten Sleman that have competitively economic prospect.

PENDAHULUAN

Hampir 2 tahun sudah kita menjalankan paradigma pembangunan yang telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Hal itu ditunjukkan dengan pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan daerah dalam menjalankan kedua undang-undang tersebut adalah masalah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi TAP MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan

*) Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

**) Drs. Rudy Badrudin, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah propinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Daerah propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten atau daerah kota.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan - perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi-kecuali di bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan dengan ditetapkan dengan Pemerintahan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggung-jawab adalah perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuen-si pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi, yaitu dalam penentuan kebijakan untuk membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dituntut untuk siap

menghadapi Otonomi Daerah tersebut. Pemerintah daerah bakal lebih leluasa mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD setelah Otonomi Daerah diberlakukan tetapi dengan usaha dan strategi jitu mengingat kondisi BUMD yang ada sekarang ini masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia, 22 Desember 1999). DPRD juga dituntut untuk menjadi "oposisi" yang konstruktif bagi eksekutif pada saat Otonomi Daerah diberlakukan sehingga pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang seimbang (Kompas, 16 Desember 1999).

Tantangan pelaku ekonomi di daerah dalam rangka Otonomi Daerah ditunjukkan oleh hasil studi Bappenas yang menyatakan bahwa pada waktu kedua UU tentang Otonomi Daerah diberlakukan maka hanya ada lima propinsi -Daerah Istimewa Aceh, Riau, Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan- yang mampu menghidupi perekonomiannya sedangkan pusat dan propinsi lainnya akan mati (bangkrut). Bangkrutnya pusat dan propinsi lainnya dimungkinkan dalam UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 ayat 1 yang menyatakan daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain. Dengan demikian, sangat dimungkinkan suatu daerah akan hilang namanya dan terhapus dari peta dunia. Tantangan tersebut muncul seperti yang dituliskan di awal pembahasan karena kelemahan yang dimiliki masing-masing daerah, yaitu berupa pembagian hasil sumberdaya alam dimana penerimaan pusat dari sumberdaya kehutanan, pertambangan umum, perikanan sebanyak 20% dan sebanyak 80% untuk daerah penghasil. Untuk sektor pertambangan minyak bumi dibagi 85% untuk pusat dan 15% untuk daerah penghasil, sementara gas alam dibagi 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah penghasil. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 10% untuk pusat dan 90% untuk daerah, dan penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Sebanyak 10% dan 20% penerimaan PBB dan BPHTB yang diterima pusat akan dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota. Dana reboisasi 60% untuk pusat dan 40% untuk daerah (Bisnis Indonesia, 1 Desember 1999).

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya

nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah ditunda sampai dengan akhir tahun anggaran 2002, kecuali yang dilakukan melalui pemerintah pusat sebagaimana janji pemerintah dalam *Letter of Intent* (LoI) keempat yang ditandatangani di Jakarta, 13 Desember 2001 yang lalu (Kompas, 15 Desember 2001, hal. 13).

Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus pandai dalam menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Tetapi bukan dengan membuat berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah atau retribusi daerah yang ujung-ujungnya akan memberatkan bagi pelaku ekonomi di daerah tersebut sehingga akan menjadi bumerang bagi otonomi daerah tersebut. Hal itu bahkan sudah ditegaskan dalam LoI IV, bahwa IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut perda-perda (68 perda) yang bermasalah (Kompas, 26 Nopember 2001, hal. 15).

Sumber dana daerah alternatif dapat pula digali oleh pemerintah daerah melalui pembentukan BUMD yang apabila dikelola secara profesional maka BUMD akan memperoleh keuntungan yang dapat menjadi

sumber PAD. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi masing-masing wilayah. Untuk mengetahui potensi masing-masing wilayah, maka perlu dilakukan penghitungan nilai *location quotient* (LQ) masing-masing wilayah. Nilai LQ dihitung dengan membandingkan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah (misalnya kecamatan) dengan sumbangan sektor tersebut secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB dari wilayah yang lebih luas (misalnya kota atau kabupaten). Apa-bila nilai LQ lebih besar daripada 1, maka wilayah yang bersangkutan berpotensi untuk mengembangkan sektor yang diamati. Artikel ini akan membahas bagaimana kemungkinan mengembangkan wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman melalui pembentukan BUMD di Kabupaten Sleman dengan menggunakan analisis LQ.

KONDISI KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sleman 1999-2000, kontribusi sektor tersier pada PDRB sangat dominan, yakni 56,5% (naik 2,8%) pada tahun 1998. Termasuk dalam sektor tersier ini adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian hanya 18,08% (turun 2,77%). Sedangkan kontribusi sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik dan gas, serta air bersih dan sektor bangunan menurun 0,17%, yaitu menjadi 25,42% pada tahun 1998.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, beban pembiayaan semakin berat. Peningkatan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan absolut PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebagai gambaran kondisi PAD selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Realisasi PAD Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (dalam juta rupiah)	Peningkatan (dalam %)
1995/1996	7.442	-
1996/1997	10.574	42
1997/1998	13.647	29
1998/1999	14.786	8
1999/2000*)	18.180	-

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2000.

*) target.

Berdasarkan sektor pajak sumber PAD yang menjadi andalan adalah pajak PPI dan pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk retribusi daerah yang menjadi andalan adalah retribusi dari Rumah Sakit Umum Daerah dan dari pasar. Untuk meperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemda Sleman mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni kegiatan ekonomi yang berbasis pada masyarakat dan untuk pe-ning-katan kesejahteraan masyarakat. Agar usaha pengembangan

tersebut dapat te-re-lisasi diper-lu-kan dana investasi. Kabupaten Sleman berupaya menggali dana pem-bangunan secara optimal dari berbagai sumber, baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor non pemerintah. Pengembangan kegiatan investasi di Kabupaten Sleman dikategorikan dalam investasi fasilitas dan invesatsi non fasilitas. Kegiatan investasi selama ta-hun 1999 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 1999

Jenis investasi	Jumlah perusahaan	Nilai investasi	Jumlah TKI	Jumlah TKA
1. Investasi Fasilitas	7	US \$4,531,666	1.312	3
- PMA	5	US \$2,464,994	428	-
- PMDN	2	US \$2,066,666	884	-
2. Investasi Non Fasilitas	1.081	Rp100.107.915.000	8.455	-

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2000.

Kabupaten Sleman yang terletak di Propinsi DIY - propinsi yang miskin akan sumber dana - perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman, yang meliputi pajak daerah, retribusi da-erah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD man-diri Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman secara mandiri. Pembiayaan secara mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi

Kabupaten Sleman apabila mengharapkan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hal atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman da-erah pun belum bisa diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah ditunda sampai dengan akhir tahun anggaran 2002.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, beban pembiayaan semakin berat. Perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 5 tahun ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3
APBD Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000

Tahun Anggaran	APBD	Rutin (realisasi)	Pembangunan (realisasi)
1995/1996	Rp 31.175.567.807	41,36%	58,63%
1996/1997	Rp 71.245.963.589	70,73%	29,26%
1997/1998	Rp 89.793.768.700	70,39%	29,60%
1998/1999	Rp 94.770.460.246	75,99%	24,00%
1999/2000	Rp 141.596.967.572	76,55%	23,44%
2000	Rp 133.731.085.488	77,06%	22,94%

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2000.

Berdasarkan realisasi PAD yang tergal tersebut, dapat ditunjukkan kontribusi PAD terhadap realisasi APBD dan APBD non rutin sebagai berikut:

Tabel 4
Kontribusi PAD Sleman Tahun Anggaran 1995/1996 - 1999/2000

Tahun Anggaran	Kontribusi Pada APBD	Kontribusi Pada APBD Non Belanja
1995/1996	22,69 %	27,32 %
1996/1997	14,68 %	33,19 %
1997/1998	14,92 %	35,79 %
1998/1999	14,91 %	35,48 %
1999/2000	11,86 %	32,34 %

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2000.

Berdasarkan Tabel 4, nampak bahwa sumber anggaran APBD Kabupaten Sleman yang berasal dari PAD makin menurun. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sleman dapat menggali berbagai sumber PAD yang dapat meningkatkan peranan PAD dalam

APBD. Salah satu sumber PAD yang dapat digali adalah membentuk dan mengembangkan BUMD yang nantinya dapat menghasilkan laba BUMD yang disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai salah satu sumber anggaran APBD. BUMD

dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendekatan identifikasi potensi masing-masing wilayah kecamatan melalui penghitungan nilai *location quotient* (LQ) masing-masing wilayah kecamatan.

TEORI PERTUMBUHAN WILAYAH

Model Tempat Sentral (MTS) relevan bagi perencanaan kota dan regional karena sistem hierarkis merupakan sarana yang efisien untuk administrasi dan alokasi sumber-sumber kepada daerah. Tempat sentral merupakan titik pertumbuhan inti di daerahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah. Dengan demikian, jelas bahwa distribusi ruang dan besar dari pusat-pusat kota merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur daerah-daerah nodal dan melahirkan konsep-konsep dominasi dan polarisasi yang mensifati struktur ini. Dalam MTS juga dikemukakan tentang interdependensi antara pusat-pusat kota dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Teori lokasi yang disebut dengan “kutub-kutub pertumbuhan” (*growth poles*) yang dipelopori oleh ekonom-ekonom Perancis, yaitu Francois Perroux dan Boudeville. Perroux dan Boudeville mendefinisikan sebuah kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan sebuah industri unggul (*leading industry*). Perroux dan Boudeville mengatakan, bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang memusat pada kota-kota besar (aglomerasi ekonomi) dan didukung oleh sebuah daerah belakang (*hinter-land*) yang kuat karena berlakunya aglomerasi ekonomi (Alonso W., 1989, hal. 334).

Pendekatan *growth poles* menekankan pentingnya pusat-pusat wilayah utama untuk pertumbuhan dengan maksud agar pertumbuhan tersebut dapat menimbulkan efek pertumbuhan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, pendekatan *growth poles* dapat digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik desa-kota, yaitu dengan mengembangkan kota melalui pengembangan sektor industri dengan tujuan agar perkembangan ini

menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dan menyebar (*spread effect*) ke perkembangan desa melalui arus barang hasil industri ke desa, arus bahan mentah untuk industri dan bahan pangan dari desa, arus urbanisasi atau “*commuter*” ke kota dan mungkin juga arus modal dari desa ke kota. Makin murah biaya produksi industri di kota dan atau makin rendah biaya transportasi dari kota ke desa maka makin luas pengaruh perkembangan kota ke desa.

Dalam kenyataannya, perkembangan kota mengakibatkan terjadinya polarisasi (“*polarization*” atau “*backwash effect*”) terhadap perkembangan desa, karena adanya urbanisasi tenaga kerja muda ke kota sehingga desa kehilangan tenaga produktif untuk mengembangkan desa itu sendiri. Untuk menanggapi polarisasi maka John Friedmann dan Mike Douglas mengajukan pendekatan spasial yang disebut *agropolitan approach*. Pendekatan agropolitan menyarankan agar pola pertumbuhan sebagai berikut:

- a. wilayah pertumbuhan yang secara geografis relatif sempit (untuk Indonesia luasnya lebih kurang satu kecamatan),
- b. ada kemandirian dalam perencanaan pembangunan wilayahnya,
- c. ada diversifikasi dalam *employment* antara pertanian dan non pertanian,
- d. ada potensi pengembangan industri yang didasarkan pada sumberdaya yang terdapat di wilayah tersebut, dan
- e. pendayagunaan teknologi lokal.

Model polarisasi spasial ekonomi lain adalah model yang ditemukan Albert Hirschman dan Gunnar Myrdal. Hirschman dan Myrdal berpendapat, bahwa karena potensi sumberdaya yang tidak seragam dan tidak merata antara region satu dengan region lainnya maka region-region dalam sebuah negara akan tumbuh secara tidak bersama-sama dan tidak seragam. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila region-region kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi region-region lemah. Perembetan pertumbuhan ini bisa berdampak positif (*trickle-down effect*), yaitu adanya pertumbuhan di region yang kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah yang masih menganggur atau mungkin region

yang lemah meng-hasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang lebih kuat.

Hakekat kutub-kutub pertumbuhan adalah memandang pusat kota sebagai tempat sentral bagi titik pertumbuhan inti di daerahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi keseluruhan daerah. Dengan demikian, dalam teori MTS terjadi interdependensi antara pusat-pusat kota dengan daerah-daerah di sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Sleman dengan pendekatan pusat pertumbuhan tepat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan antarwilayah karena adanya potensi sumber-daya yang tidak merata antarwilayah di Kabupaten Sleman. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, Kabupaten Sleman perlu memilah satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan wilayah di kecamatan yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila wilayah-wilayah kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi wilayah-wilayah lemah.

Untuk mengetahui potensi yang terdapat di pusat pertumbuhan wilayah (kecamatan) dan daerah-daerah lainnya yang diharapkan dapat ditarik pertumbuhannya dapat digunakan metode melalui pengamatan terhadap nilai LQ sektoral wilayah. Perhitungan nilai LQ menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_i^r / X^r}{X_i^n / X^n}$$

Keterangan:

LQ adalah nilai *location quotient*

X adalah variabel yang diamati

r adalah daerah kecamatan

I adalah sektor

n adalah daerah kabupaten

Perhitungan dalam LQ adalah dengan membandingkan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah (kecamatan) dengan sumbangan sektor tersebut secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB dari wilayah yang lebih luas (kabupaten). Apabila nilai LQ lebih besar daripada 1, maka wilayah yang bersangkutan berpotensi untuk mengembangkan sektor yang diamati.

ANALISIS DATA

Berikut ini akan dibahas analisis terhadap data penelitian yang meliputi data PDRB Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman, dan *Location Quotient* (LQ) per kecamatan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut akan diperoleh sektor-sektor per kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di kecamatan-kecamatan. Munculnya BUMD baru yang berbasis di kecamatan-kecamatan, akan sejalan dengan rencana pembangunan makro Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pembentukan BUMD baru akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan mengembangkan kecamatan yang berpotensi ekonomi (berdasarkan nilai LQ) sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Sleman.

Analisis PDRB Kabupaten Sleman

Produk Domestik Sleman merupakan seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik Sleman tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah domestik Sleman. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik Sleman. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik Sleman atau *region* Sleman adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region Sleman. Kondisi yang sebenarnya menunjukkan bahwa sebagian faktor produksi dari kegiatan produksi di Sleman berasal dari wilayah lain. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki wilayah Sleman ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sleman menunjukkan gambaran "*Production Originatae*". Hal ini mengakibatkan nilai produksi domestik yang timbul di wilayah Sleman tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah Sleman. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa gaji/upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan) yang mengalir antar wilayah ini

(termasuk dari/ke luar negeri), maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dengan Produk Regional. Produk Regional Sleman adalah produk domestik Sleman ditambah pendapatan dari luar wilayah Sleman dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar

wilayah tersebut. Dengan demikian, Produk Regional Sleman merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah Sleman. Data PDRB Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Produk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1999 (Ribuan Rupiah)

Nomor	Lapangan Usaha	Jumlah (rupiah)	Persentase
1	Pertanian	594.296.576	18,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	13.301.001	0,40%
3	Industri Pengolahan	468.842.726	14,25%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	24.852.147	0,76%
5	Bangunan	279.036.781	8,48%
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	621.894.740	18,90%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	286.808.695	8,72%
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	395.140.376	12,01%
9	Jasa-Jasa	606.604.469	18,43%
	Jumlah	3.290.777.511	100,00%

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 1999. BPS Sleman.
Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5, nampak bahwa lima sektor besar memberikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Sleman tahun 1999, yaitu terbesar sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,90%. Sektor-sektor berikutnya adalah sektor jasa-jasa sebesar 18,43%, sektor pertanian sebesar 18,06%, sektor industri pengolahan sebesar 14,25%, serta sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 12,01%. Apabila kelima sektor besar dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Sleman dikelompokkan dalam tiga sektor pertanian, industri, dan jasa maka masing-masing sektor mampu memberikan kontribusi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Kontribusi Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa Dalam
Produk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1999 (Ribuan Rupiah)

Nomor	Lapangan Usaha	Persentase
1	Pertanian	18,06%
2	Industri Pengolahan	14,25%
3	Jasa	49,34%

Sumber: Diolah dari Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 6, nampak bahwa di Kabupaten Sleman sektor jasa mempunyai kontribusi terbesar yaitu 49,34%. Jadi hampir 50% PDRB Kabupaten Sleman dihasilkan oleh sektor jasa. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan hal tersebut karena berkaitan dengan penyediaan lahan dan prasarana lainnya yang dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan dalam mengembangkan dan membentuk BUMD di Kabupaten Sleman. Artinya, BUMD yang dapat dikembangkan dan dibentuk di Kabupaten Sleman adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB. Oleh karena sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sleman adalah sektor jasa, maka BUMD yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dibentuk adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor jasa. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan

untuk mengembangkan sektor industri dan pertanian dengan alasan untuk sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber pembiayaan yang berasal dari daerah - Pendapatan Asli Daerah- menjadi sumber pembiayaan utama untuk pelaksanaan pembangunan di daerah.

Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sleman

Data pada Tabel 7 menunjukkan nilai PDRB Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 1999. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan penghitungan nilai LQ untuk Kabupaten Sleman per lapangan usaha yang hasil penghitungannya dapat dilihat pada Tabel 8. Berikut ini disajikan Tabel 7 tentang PDRB Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 1999.

Tabel 7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Sleman dan Propinsi DIY, Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 1999 (Ribuan Rupiah)

NO.	LAPANGAN USAHA	SLEMAN	DIY
1	Pertanian	594.296.576	2.413.407.000
2	Pertambangan dan Penggalian	13.301.001	170.321.000
3	Industri Pengolahan	468.842.726	1.874.604.000
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	24.852.147	76.127.000
5	Bangunan	279.036.781	826.970.000
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	621.894.740	2.182.793.000
7	Pengangkutan dan Komunikasi	286.808.695	1.112.647.000
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	395.140.376	1.033.170.000
9	Jasa-Jasa	606.604.469	1.883.604.000
PDRB		3.290.777.511	11.573.643.000

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka Tahun 1999. BPS Propinsi DIY. 1999.

Berdasarkan Tabel 8, nampak bahwa beberapa sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Besarnya nilai LQ yang lebih besar daripada 1 untuk sektor-sektor di Kabupaten Sleman tersebut menunjukkan bahwa

sektor-sektor tersebut memungkinkan untuk dikembangkan. Apabila sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 dikelompokkan dalam kategori 3 sektor, maka sektor-sektor di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 ternyata termasuk dalam kategori sektor jasa. Hal ini sesuai dengan perhitungan pada Tabel 6 yang menghasilkan pendapat bahwa hampir 50% PDRB

Kabupaten Sleman dihasilkan oleh sektor jasa. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan hal tersebut karena berkaitan dengan penyediaan lahan dan prasarana lainnya yang dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan dalam mengembangkan dan

membentuk BUMD di Kabupaten Sleman. Artinya, BUMD yang dapat dikembangkan dan dibentuk di Kabupaten Sleman adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mempunyai kemungkinan potensi untuk dikembangkan mengingat nilai LQ sektor yang lebih besar daripada 1.

Tabel 8
Location Quotient (LQ)
Kabupaten Sleman, Tahun 1999

NO.	LAPANGAN USAHA	LQ
1	Pertanian	0.8661
2	Pertambangan dan Penggalian	0.2747
3	Industri Pengolahan	0.8796
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.1481
5	Bangunan	1.1867
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.0020
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.9066
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.3451
9	Jasa-Jasa	1.1326

Sumber: Diolah dari Tabel 7.

Analisis Location Quotient (LQ) per Kecamatan se Kabupaten Sleman

Berdasarkan data tentang PDRB kecamatan se Kabupaten Sleman menurut lapangan usaha atas dasar

harga berlaku dapat dilakukan penghitungan nilai LQ per kecamatan se Kabupaten Sleman yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Nilai LQ > 1 Per Kecamatan Se Kabupaten Sleman

Kecamatan	Sektor A	Sektor B	Sektor C	Sektor D	Sektor E	Sektor F	Sektor G	Sektor H	Sektor I
Berbah									
Cangkringan									
Depok									
Gamping									
Godean									
Kalasan									
Minggir									
Mlati									

Moyudan									
Ngaglik									
Ngemplak									
Pakem									
Prambanan									
Seyegan									
Sleman									
Tempel									
Turi									

Sumber: Data diolah dari Tabel 7.

Keterangan Tabel 9:

	menunjukkan bahwa nilai LQ nya lebih besar daripada 1
--	---

- Sektor A adalah Pertanian
- Sektor B adalah Pertambangan dan Penggalian
- Sektor C adalah Industri Pengolahan
- Sektor D adalah Listrik, Gas, dan Air Bersih
- Sektor E adalah Bangunan
- Sektor F adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- Sektor G adalah Pengangkutan dan Komunikasi
- Sektor H adalah Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- Sektor I adalah Jasa-Jasa

Nampak pada Tabel 9, sektor di kecamatan Berbah yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Berarti keenam sektor tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Di Kecamatan Cangkringan, sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas, dan air bersih; dan bangunan Berarti keenam sektor tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan. Di Kecamatan Depok, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa. Di Kecamatan Gamping, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar

daripada 1 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; bangunan; dan pengangkutan dan komunikasi. Di Kecamatan Godean, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; serta pengangkutan dan komunikasi. Di Kecamatan Kalasan, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Di Kecamatan Minggir, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Di Kecamatan Mlati, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan

mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa. Di Kecamatan Moyudan, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian, industri pengolahan, serta pengangkutan, dan komunikasi. Di Kecamatan Ngaglik, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; listrik, gas, dan takut bersih. Di kecamatan Ngemplak sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran.

Di kecamatan Pakem, nilai LQ yang lebih besar daripada 1 adalah pertanian; listrik, gas, dan air bersih; serta perdagangan, hotel, dan restoran. Di Kecamatan Prambanan, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran. Di Kecamatan Seyegan, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah pertanian; industri pengolahan; dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Di Kecamatan Sleman, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa. Di Kecamatan Tempel, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalan; industri pengolahan, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa. Di Kecamatan Turi, sektor yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan mengingat nilai LQnya lebih besar daripada 1 adalah sektor pertanian.

Berdasarkan Tabel 9, maka pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengembangkan potensi di masing-masing wilayah kecamatan berdasarkan penghitungan nilai LQ sektor per kecamatan di Kabupaten Sleman yang lebih besar daripada 1. Potensi yang dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan Kabupaten Sleman memungkinkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk membentuk dan mengembangkan BUMD di Kabupaten Sleman. Pembentukan dan pengembangan BUMD di Kabupaten Sleman dapat menjadikan Kabupaten Sleman memiliki sumber-sumber pembiayaan anggaran APBD yang lebih mandiri terutama dalam era otonomi daerah.

SIMPULAN

Mengingat sumber anggaran APBD Kabupaten Sleman yang berasal dari PAD makin menurun maka pemerintah Kabupaten Sleman dapat menggali berbagai sumber PAD yang dapat meningkatkan peranan PAD dalam APBD. Salah satu sumber PAD yang dapat digali adalah melalui pembentukan dan pengembangan BUMD yang nantinya dapat menghasilkan laba BUMD yang disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai salah satu sumber anggaran APBD. BUMD dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendekatan identifikasi potensi masing-masing wilayah kecamatan melalui penghitungan nilai *location quotient* (LQ) masing-masing wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut akan diperoleh sektor-sektor per kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1. Sektor-sektor di 17 kecamatan Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 mempunyai potensi ekonomi untuk diusulkan pembentukan dan pengembangan BUMD nya.